



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA-077.01-0/2023**



**A. DASAR HUKUM :**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI  |
| 2. UNIT ORGANISASI             | : | 077.01 Mahkamah Konstitusi Ri   |
| 3. PAGU                        | : | Rp.415.000.371.000<br>(EMPAT RATUS LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :**

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA  
NIP.196612301991021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023**



DS:3119-2204-3025-2692

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

Halaman : 1 dari 7

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI	: 01	Mahkamah Konstitusi Ri
3. PAGU	: Rp.415.000.371.000	(EMPAT RATUS LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

**B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :**

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	111.777.156
	: 077.01.WA	Program Dukungan Manajemen	303.223.215
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	
	: 02	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi	
	: 03	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	
3. FUNGSI	: 03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	415.000.371
SUB FUNGSI	: 0304	PERADILAN	415.000.371
4. PRIORITAS NASIONAL	: 07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	21.750.000
NON PRIORITAS NASIONAL	:		393.250.371



**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi		111.777.156
SP01	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu		
IKP01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	80 Skor	
IKP02	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73 %	
IKP03	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 Bulan	
SP02	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK		
IKP01	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	75 Skor	
SP03	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat		
IKP01	Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	80 %	
3372	Penanganan Perkara Konstitusi		77.052.156
01.01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	80 skor	
01.02	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73 %	
01.03	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 Bulan	
01.04	Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu	90 %	
01.05	Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu	90 %	
01.06	Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu	90 %	
01.07	Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu	90 %	
01.08	Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu	90 %	
01.09	Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu	90 %	
01.10	Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100 %	
01.11	Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	90 %	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	01.12 Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	80 %	
	01.13 Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya	70 %	
	01.14 Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80 %	
	01.15 Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum	80 %	
	01.16 Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik	75 %	
	01.17 Persentase General Administration System berbasis Elektronik	75 %	
	01.18 Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	80 Skor	
	01.19 Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	81 Skor	
	01.20 Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan	81 Skor	
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		21.750.000
	01.01 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	75 Skor	
	01.02 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3.25 Nilai	
	01.03 Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	77 %	
4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK		12.975.000
	01.01 Persentase Diseminasi putusan MK di media elektronik	100 %	
	01.02 Persentase Diseminasi Perkembangan Penanganan Perkara di Media Elektronik	100 %	
	01.03 Persentase Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	100 %	



**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
077.01.WA	Program Dukungan Manajemen		303.223.215
SP01	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif		
IKP01	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional	95 %	
SP02	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya		
IKP01	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP Opini BPK	
IKP02	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB+ Nilai	
IKP03	Indeks Layanan Administrasi Umum	81 Skor	
SP03	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas		
IKP01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	80 %	
SP04	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya		
IKP01	Tingkat layanan perkantoran, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengamanan	80 Skor	
SP05	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional		
IKP01	Nilai Reformasi Birokrasi	82 Nilai	
IKP02	Persentase Program Pengembangan Kompetensi SDM	80 %	
3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional		17.050.000
01.01	Persentase Tersusunnya Laporan Persiapan Kegiatan Internasional yang efektif	95 %	
01.02	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Koordinasi Kegiatan Sektap AACC yang efektif	80 %	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023**



DS:3119-2204-3025-2692

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan		72.962.344
01.01	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85 %	
01.02	Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana	10 %	
01.03	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100 %	
01.04	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	80 %	
01.05	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	81 Skor	
02.01	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95 %	
02.02	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100 %	
02.03	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 %	
3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi		210.265.871
01.01	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70 %	
01.02	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar MK	95 %	
01.03	Persentase Digitalisasi Arsip Perkara	90 %	
01.04	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN)	85 %	
01.05	Persentase Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	100 %	
01.06	Tingkat layanan kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan	80 Skor	
01.07	Persentase terpenuhinya sarana prasarana pelayanan publik sesuai permintaan	70 %	
4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern		375.000
01.01	Tingkat Maturitas SPIP	3 Nilai	
01.02	Tingkat Maturitas APIP	3 Level	
01.03	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	80 %	
01.04	Tingkat Layanan Pengawasan Intern	81 Skor	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023



DS:3119-2204-3025-2692

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

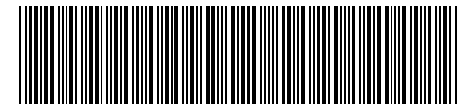
KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	01.05 Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti	100 %	
	01.06 Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu	90 %	
	01.07 Persentase Tindaklanjut atas Laporan, Pengaduan Masyarakat, WBS, Benturan Kepentingan dan Kejadian Pungli	100 %	
	02.01 Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju WBK dan WBBM	2 Unit Kerja	
	02.02 Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu	100 %	
5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi		2.570.000
	01.01 Persentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata laksana berbasis IT	85 %	
	01.02 Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi	100 %	
	02.01 Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi SDM	80 %	
	02.02 Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	80 Skor	

Jakarta, 30 November 2022  
SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH  
NIP 196501081990021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023**



DS:3119-2204-3025-2692

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 30 November 2022  
SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH  
NIP 196501081990021001





DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023



DS:3119-2204-3025-2692

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 Mahkamah Konstitusi Ri  
3. PAGU : Rp.415.000.371.000  
(EMPAT RATUS LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi		0	111.677.155	100.001	0	111.777.156	0
	01	DKI JAKARTA		0	111.677.155	100.001	0	111.777.156	0
	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	KP	0	111.677.155	100.001	0	111.777.156	0
	A00	RM		0	111.677.155	100.001	0	111.777.156	0
	077.01.WA	Program Dukungan Manajemen		72.717.344	177.659.684	52.846.187	0	303.223.215	96.100.712
	01	DKI JAKARTA		72.717.344	177.659.684	52.846.187	0	303.223.215	96.100.712
	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	KP	72.717.344	177.659.684	52.846.187	0	303.223.215	96.100.712
	A00	RM		72.717.344	177.659.684	52.846.187	0	303.223.215	96.100.712
		Target Pendapatan						293.407	
		TOTAL		72.717.344	289.336.839	52.946.188	0	415.000.371	96.100.712
		RM		72.717.344	289.336.839	52.946.188	0	415.000.371	96.100.712
		PENDAPATAN						293.407	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 30 November 2022  
SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH  
NIP 196501081990021001



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDIK  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA-077.01-0/2023**



**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 Mahkamah Konstitusi Ri  
3. PAGU : Rp.415.000.371.000  
(EMPAT RATUS LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

**B. RENCANA PER PROGRAM**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi													
		RENCANA PENARIKAN DANA	111.777.156	9.300.069	9.300.069	9.332.244	9.340.069	9.300.069	9.300.069	9.320.069	9.320.069	9.320.069	9.320.069	9.320.069	9.304.222
2	077.01.W	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	303.223.215	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.268.497	25.269.748
		PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	293.407	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.457
		<b>TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA</b>	<b>415.000.371</b>	<b>34.568.566</b>	<b>34.568.566</b>	<b>34.600.741</b>	<b>34.608.566</b>	<b>34.568.566</b>	<b>34.568.566</b>	<b>34.588.566</b>	<b>34.588.566</b>	<b>34.588.566</b>	<b>34.588.566</b>	<b>34.588.566</b>	<b>34.573.970</b>
		<b>TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN</b>	<b>293.407</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.457</b>

Jakarta, 30 November 2022  
SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH  
NIP 196501081990021001